

Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Refilio Andika Pratama¹
Shinta Widyastuti^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
*Shinta.widyastuti@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of tax revenue and inflation rate on economic growth in Indonesia. The variables used in this study are the level of tax revenue, the rate of inflation and also the rate of economic growth in Indonesia. The sample used in this study amounted to 30 samples with a total research data of 90 data originating from 30 years of research multiplied by 3 economic data variables, namely data on the ratio of tax revenues, inflation rates and also GDP. The sample selection technique in this study uses judgment sampling because the sample to be used by the researcher considers the completeness of the available data related to the variables in the study. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression analysis using the SPSS version 25. This study shows that tax revenue has no effect on economic growth in Indonesia. In addition, this study gives the result that the inflation rate variable has a negative effect on the variable of economic growth in Indonesia.

Keywords: Tax Revenue; Inflation Rate; Economic Growth

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan pajak, tingkat inflasi dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 dengan total data penelitian tersebut berjumlah 90 data yang berasal dari 30 tahun penelitian dikalikan dengan 3 variabel data perekonomian yaitu diantaranya data rasio penerimaan pajak, tingkat inflasi dan juga PDB. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *judgement sampling* karena sampel yang akan digunakan peneliti mempertimbangkan adanya kelengkapan data yang tersedia yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program computer SPSS versi 25. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh namun kearah negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak; Tingkat Inflasi; Pertumbuhan Ekonomi



Veteran Economics,
Management, & Accounting
Review
Vol. 1, No. 1, 2022
pp. 104-120

Received: August 1st, 2022
Published: September 26th, 2022

Corresponding email:
shinta.widyastuti@upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Berbagai macam perubahan pada sektor perekonomian dapat menimbulkan terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang diikuti juga bertumbuhnya produksi dalam negeri, meningkatnya pendapatan dalam negeri, dan meningkatnya pendapatan perkapita. Contoh perubahan-perubahan pada sektor perekonomian adalah seperti pendirian berbagai macam industri bisnis yang baru dan peningkatan pada sektor ekspor-impor dapat memberikan perubahan pada sektor industri dan sektor perdagangan yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut merupakan tujuan pembangunan yang diinginkan oleh seluruh negara. Istilah pertumbuhan ekonomi dipakai sebagai gambaran atas terjadinya perkembangan atau kemajuan perekonomian pada suatu negara. Salah satu indikasi keberhasilan suatu negara adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini sendiri memiliki arti sebagai kemajuan dalam kegiatan perekonomian yang membuat barang dan jasa yang di produksi didalam masyarakat meningkat dan tumbuhnya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat (Daniel, 2018). (Ofoegbu et al., 2016) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah upaya intervensi kebijakan yang ditujukan pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Fokus perhatiannya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengenalan produk baru, layanan yang menggunakan teknologi modern, mitigasi risiko, dinamika inovasi, dan kewirausahaan. Tujuan pembangunan ekonomi itu untuk membuat lingkungan yang sesuai untuk masyarakat agar dapat mengembangkan cara baru dalam memproduksi barang yang berkualitas dan dapat memimpin dalam pengesporan barang ke luar negeri. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi secara khusus merupakan peningkatan nilai barang atau jasa pada suatu negara selama suatu periode dan menggunakan peningkatan PDB suatu negara untuk mengukurnya. Maka dari itu sangat memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pembangunan ekonomi dalam jangka pendek ataupun menengah. Dengan kata lain kondisi lingkungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diciptakan melalui investasi dari pendapatan nasional dalam pembangunan di bidang infrastruktur dan selanjutnya digunakan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat suatu negara (Ofoegbu et al., 2016). Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi.

Peran pemerintah sebagai tokoh utama dalam penyelenggara kenegaraan sangatlah penting dalam menentukan dan mengarahkan kebijakan pembangunan suatu negara. Pemerintah sebagai pihak yang melakukan penyelenggaraan pembangunan suatu negara sangat bergantung terhadap pendapatan dalam negeri yang mayoritas berasal dari penerimaan pajak. Ada tiga indikator dalam menentukan berhasilnya reformasi perpajakan yaitu berkaitan dengan birokrasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan, efektif serta efisien, dan juga kualitas dari pelayanan terhadap masyarakat yang bagus (Saragih, 2018). Maksud dari tiga indikator itu adalah bersih atau sehat dari tindak korupsi, dapat membuat prosedur pajak yang efektif serta efisien agar memberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk membayarkan pajaknya masing-masing, dan meningkatnya kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Kebijakan pajak sangat diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam tingkat global (Sihaloho, 2020a). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui belanja pembangunan atau modal sumbernya juga berasal dari penerimaan pajak. Pajak sendiri adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi pemasukan negara disamping pendapatan dari nonpajak yaitu migas ataupun nonmigas. Sumber pendapatan negara hampir seluruhnya berasal dari pemasukan atas pajak, yakni mencapai sebesar 75 persen berasal dari sektor tersebut. Oleh karena itu, pajak sebagai pendapatan pemerintahan merupakan unsur yang sangat signifikan dalam memenuhi APBN (Sumaryani, 2019). Apabila penerimaan pajaknya tinggi, negara dapat terpicu untuk meningkatkan pengeluaran belanja oleh pemerintah dan memacu perekonomian yang akhirnya menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dalam jurnal Ardani et al., (2010) keterkaitan antara pajak dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi

diperjelas oleh teori yang diutarakan Peacock dan Wiseman yang beranggapan jika terjadinya perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan terhadap pajak akan meningkat meskipun tarif pajaknya tetap sama yang akan mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak yang juga mengakibatkan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Atas dasar itu, dalam keadaan normal, peningkatan atas PDB juga menyebabkan pendapatan pemerintah semakin besar, namun diikuti dengan pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah juga. Penerimaan negara dalam membiayai pembangunan untuk menjalankan roda pemerintahan sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi atas penerimaan pajak. Penerimaan negara yang merata akibat tingginya tingkat penerimaan pajak kepada pemerintah dapat melancarkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar (Sihaloho, 2020).

Disamping itu, keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia seiring berjalannya waktu dari tahun sebelumnya hingga tahun-tahun berikutnya seringkali dalam keadaan defisit yang dimana pengeluaran yang dilakukan oleh negara melebihi pendapatan yang diterima oleh negara. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya inflasi dikarenakan apabila negara mengalami masalah pengangguran yang serius maka kebijakan anggaran belanja defisit perlu dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Sebenarnya kebijakan anggaran defisit ini ditempuh atau dipakai oleh pemerintah untuk mensiasati agar meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. Karena kondisi anggaran negara mengalami defisit, maka pemerintah akan menggunakan sebuah rencana yaitu mencari sumber dana dari pihak-pihak lain dengan tujuan untuk menumbuhkan laju usaha dan meningkatkan perekonomian negara. Namun disisi lain, dengan melakukan pinjaman dana dari pihak lain tersebut membuat negara akan memiliki hutang, terlebih lagi jika negara berhutang banyak. Peningkatan jumlah uang yang beredar tersebut dapat menyebabkan harga barang-barang menjadi meningkat atau bertambah dan akan memicu terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Dampak dari inflasi yang tinggi serta tidak stabil mencerminkan tidak stabilnya perekonomian yang mengakibatkan naiknya harga barang atau jasa secara umum dan berkala yang memiliki imbas terhadap semakin tingginya angka tingkat kemiskinan di Indonesia. Lalu akibat dari tingginya tingkat inflasi, maka masyarakat yang sebelumnya mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nya lalu terjadi kenaikan harga barang atau jasa yang sangat tinggi menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan akhirnya timbul kemiskinan. Tingkat inflasi di Indonesia bisa dikatakan fluktuatif dari tahun 1991 hingga tahun 2020. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1991 tingkat inflasi di Indonesia adalah sebesar 9,52 persen, pada tahun 1992 mengalami penurunan sebesar 4,94 persen, pada tahun mengalami kenaikan 1993 9,77 persen, pada tahun 1994 sebesar 9,24 persen, pada tahun 1995 tingkat inflasi Indonesia mengalami penurunan ke angka 8,60 persen, pada tahun 1996 sebesar 6,50 persen, pada tahun 1997 11,10 persen, pada tahun 1998 inflasi mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 77,60 persen dikarenakan pada tahun ini terjadi tragedi sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri, lalu selanjutnya pada tahun 1999 tingkat inflasi sebesar 2,00 persen, lalu pada tahun 2000 sebesar 9,40 persen, pada tahun 2001 sebesar 12,55 persen, lalu pada tahun 2002 sebesar 10,53 persen, pada tahun 2003 sebesar 5,16 persen, pada tahun 2004 sebesar 6,40 persen, lalu pada tahun 2005 sebesar 17,11 persen, pada tahun 2006 sebesar 6,60 persen, pada tahun 2007 sebesar 6,59 persen, lalu pada tahun 2008 sebesar 11,06 persen, lalu pada tahun 2009 2,78 persen, lalu pada tahun 2010 tingkat inflasi yang terjadi sebesar 6,96 persen, lalu pada tahun 2011 tingkat inflasi di Indonesia adalah sebesar 3,79 persen, lalu pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,3 persen, pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,38 persen, pada tahun 2014 tingkat inflasi yang terjadi cukup stabil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berada di angka 8,36 persen, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3,35 persen, lalu pada tahun 2016 berada di angka 3,02 persen, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 3,61 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,13 persen, selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 2,72 persen dan terakhir pada tahun 2020

tingkat inflasinya sebesar 1,68 persen. Untuk tahun 2020, tingkat inflasi yang terjadi merupakan yang paling rendah yang pernah tercatat dalam sejarah, hal itu disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Akibat dari terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan lesunya daya beli atau permintaan masyarakat yang membuat harga jual barang usaha sulit mengalami kenaikan harga. Dari segi kebijakan moneter, inflasi memiliki pengaruh kuat terhadap pola konsumsi masyarakat dan investasi pemerintah dalam pembentukan modal bruto berkaitan dengan harga barang atau jasa. Inflasi ini adalah suatu fenomena moneter yang dapat membuat keresahan bagi suatu negara dikarenakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dapat menjadi *boomerang* dan akan menjadi masalah yang serius terhadap perekonomian negara khususnya pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Daniel, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak di Indonesia kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan untuk mengetahui apakah tingkat inflasi dapat memiliki pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori keagenan

Teori ini memiliki penjelasan atas dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan satu sama lain. Hubungan keagenan jika ada beberapa pihak yang melakukan suatu kontrak antara prinsipal dan juga agen. Dimana prinsipal memberikan perintah kepada agen dalam melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberikan kewenangan kepada agen untuk memberikan keputusan terbaik bagi prinsipal. Dalam realitanya, prinsipal dan juga agen tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara kedua pelaku tersebut. Perbedaan kepentingan ini dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dimana konflik kepentingan antara wajib pajak yang tidak taat pajak atau melakukan penghindaran pajak dengan otoritas perpajakan yang merupakan perwakilan dari pemerintah juga sedang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak seperti yang dikemukakan oleh Habib Saragih (2018).

Teori kuantitas

Teori yang biasa digunakan mengenai inflasi adalah teori kuantitas. Masalah inflasi apalagi pada negara-negara berkembang dapat dijelaskan dengan teori ini. Ini dikarenakan terjadinya inflasi identik dengan tingginya volume uang yang beredar di masyarakat. Tingginya volume uang yang beredar akibat dari rendahnya penerimaan negara dibandingkan dengan pengeluarannya membuat negara harus meminjam dana dari pihak lain yang membuat negara berhutang. Karena adanya utang tersebut Bank Indonesia harus mencetak uang lebih banyak lagi. Lalu menurut Adebisi and Gbegi (2013) dikatakan juga karena adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat meningkatkan volume uang yang beredar namun tidak disertai dengan peningkatan pada sektor barang dan jasa. Akibat hal tersebut dapat membuat terjadinya tren inflasi karena barang yang ada langka namun uang yang beredar di masyarakat sangat banyak.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Menurut Salmon Valley Business Innovation Centre (2014) dalam jurnal Ofoegbu et al., (2016), dikatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah upaya intervensi kebijakan yang ditujukan pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Fokus perhatiannya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengenalan produk baru dan layanan yang menggunakan teknologi modern, mitigasi risiko dan dinamika inovasi dan kewirausahaan menurut Hadjimichael et al tahun 2014 dalam jurnal Ofoegbu et al., (2016). Tujuan pembangunan ekonomi itu untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengembangkan cara baru dalam memproduksi barang yang berkualitas dan dapat memimpin dalam pengeskporan barang

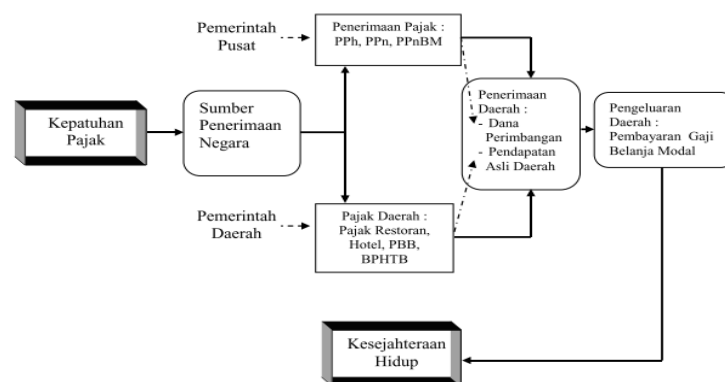
ke luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi secara khusus merupakan peningkatan nilai barang atau jasa pada suatu negara selama suatu periode dan menggunakan peningkatan PDB suatu negara untuk mengukurnya. Maka dari itu sangat memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pembangunan ekonomi dalam jangka pendek ataupun menengah (Hadjimichael et al., 2014). Dengan kata lain kondisi lingkungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diciptakan melalui investasi dari pendapatan nasional dalam pembangunan di bidang infrastruktur dan selanjutnya digunakan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat suatu negara (Wilkins & Zarawski, 2014). Robert et al. (2009) mengatakan perlu adanya pengukuran kemajuan yang baru dalam kesejahteraan masyarakat, dikarenakan bahwa PDB bukanlah patokan pengukuran yang baik karena pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan pajak

Penjelasan mengenai pajak menurut undang-undang perpajakan di Indonesia secara langsung menyinggung kata kemakmuran rakyat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan manfaat dari pajak yang dimana digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu pajak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku dan seluruh tata kelola atas anggaran yang memiliki ketransparanan serta efisien haruslah dapat menjadi prasyarat terciptanya kesejahteraan (Simanjuntak & Mukhlis, 2011b).

Tetapi dalam prakteknya, pajak tidak dengan sendirinya dapat dipungut dari masyarakat secara sukarela yang nantinya digunakan sebagai alat investasi negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat luas, pajak hingga saat ini dianggap sebagai salah satu beban biaya yang harus mereka tanggung bagi ekonomi kehidupannya. Pajak memang mengurangi pemasukan atau pendapatan seseorang akibat dari adanya pemungutan pajak itu sendiri, namun disisi lain pajak juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas dan pengenaan pajak sendiri tidak berarti menurunkan kesejahteraan seseorang menurut Cullis & Jones (1992) dalam jurnal Simanjuntak & Mukhlis, (2011). Pandangan masyarakat terkait pajak ini perlu dirubah dikarenakan dengan adanya pajak ini sendiri dapat mentransfer penghasilan dari masyarakat berpenghasilan lebih ke masyarakat yang penghasilannya tergolong kurang, sehingga akan terjadi pemerataan pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu apabila masyarakat patuh dalam membayar pajak maka penerimaan pajak pun akan meningkat dan semakin banyaknya penerimaan pajak maka pendanaan dalam mendanai pengeluaran untuk publik dan pembangunan dapat merealisasikan upaya agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Gambaran pentingnya kepatuhan pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dijelaskan dengan gambar berikut:



Sumber : Simanjuntak & Mukhlis, (2011a)

Gambar 1. Kepatuhan pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Berdasarkan pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat akan pajak dapat meningkatkan sumber pendapatan negara dari berbagai macam sumber pajak yang ada. Sumber-sumber pajak ini ada yang berasal dari penerimaan pajak pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nantinya pajak yang sudah terkumpul oleh fiskus pajak dapat digunakan untuk mendanai anggaran di pemerintahan daerah. Berbagai penerimaan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat, seperti PPh, PPn, PPnBM pada akhirnya juga akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Lalu pajak-pajak daerah yang dapat dihimpun oleh aparat pemerintah daerah, seperti ; pajak daerah, restoran, PBB dan BPHTB akan dapat mengisi pos Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD). Kedua penerimaan daerah tersebut dapat digunakan oleh pemerintahan daerah untuk mendanai pengeluaran anggaran pemerintah daerahnya nya, seperti pengeluaran untuk gaji pegawai, dan pengeluaran untuk belanja modal. Dengan adanya pengeluaran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik pengertian dari inflasi adalah keadaan perekonomian negara dimana terdapat kecenderungan dari kenaikan harga-harga dan jasa dalam jangka waktu yang panjang. Hal itu disebabkan oleh tidak sebandingnya arus uang dan barang. Naiknya harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan harga tersebut menyebar luas pada harga barang lainnya baru bisa dikatakan sebagai inflasi (Simanungkalit, 2020). Indikator perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebenarnya tidak semua inflasi itu dapat memberikan dampak yang negatif terhadap pada perekonomian. Itu terjadi jika tingkat inflasi masih tergolong rendah yaitu tingkat inflasi masih dibawah 10 persen (Simanungkalit, 2020). Untuk menghitung tingkat inflasi berdasarkan jurnal Ningsih & Andiny, (2018) dapat menggunakan rumus berikut: $Inf = (IHK_t - IHK_{t-1}) / IHK_{t-1} \times 100\%$.

Penerimaan pajak

Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan juga pajak atas perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini dapat dikatakan sebagai sumber untuk mendanai pengeluaran belanja negara yang kedepannya diharapkan memiliki manfaat atau kontribusi yang baik agar tercapainya kemandirian dalam membiayai negara. Penerimaan pajak juga bisa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah atas pembayaran pajak dari masyarakat. Menurut PMK Nomor 02/ PMK.05/ 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.06/ 2006 tentang modul penerimaan negara, penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, dan cukai. Pajak sendiri pun merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Dana yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah dapat digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah dan tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat, dan menciptakan kemakmuran. Untuk menghitung tingkat penerimaan pajak berdasarkan jurnal Sihaloho, (2020) dapat menggunakan rumus berikut: $TR = (\text{total penerimaan pajak}_{-t} / PDB_{-t}) \times 100\%$

Hipotesis

Pengaruh realisasi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Sumber utama pendapatan publik dan juga dasar dari kebijakan ekonomi yang berlaku adalah berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak tersebut dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan bagi Indonesia di dalam persaingan global. Maka dari itu

pengoptimalisasian penerimaan pajak sangatlah diperlukan, bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara akan tetapi juga sebagai suatu sarana kebijakan bagi pemerintah dalam mengatur roda perekonomian di Indonesia dengan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan pajak ini sangat diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk bersaing dalam tingkat global (Sihaloho, 2020). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui belanja pembangunan atau modal sumbernya juga berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi penerimaan negara disamping penerimaan non pajak seperti migas ataupun non migas (Sumaryani, 2019). Apabila penerimaan pajaknya tinggi, dapat memicu suatu negara untuk meningkatkan pengeluaran belanja oleh pemerintah, menciptakan iklim investasi yang baik, pendanaan pembangunan di daerah yang dapat mempengaruhi terciptanya lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi dengan mengatur uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak dengan melakukan pemungutan pajak dan memacu perekonomian yang akhirnya menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi (Perwira, 2019).

Lalu berdasarkan teori keagenan, rendahnya konflik kepentingan antara wajib pajak dengan dengan pemerintah seperti yang dikemukakan Saragih, (2018) di dalam jurnalnya dimana dikatakan jika penerimaan pajak sudah melebihi sasaran yang diinginkan akibat patuhnya para wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, serta didukung juga efektifnya reformasi pajak yang telah dilakukan. Hal tersebut memberikan pengaruh yang baik bagi penerimaan pajak dan akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu hipotesis tentang seberapa berpengaruhnya penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dikatakan memiliki pengaruh yang positif. Ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Ardani et al., (2010) yang juga menyatakan jika penerimaan pajak secara signifikan memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H₁: Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Terjadinya inflasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Dampak dari inflasi yang tinggi serta tidak stabil mencerminkan tidak stabilnya perekonomian yang mengakibatkan naiknya harga barang atau jasa secara umum dan berkala yang memiliki dampak semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Lalu akibat dari tingginya tingkat inflasi, maka masyarakat yang sebelumnya mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nya lalu terjadi kenaikan harga barang atau jasa yang sangat tinggi menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan akhirnya timbul kemiskinan (Ningsih & Andiny, 2018). Lalu berdasarkan teori kuantitas, terjadinya inflasi dikarenakan tingginya volume uang beredar di masyarakat yang bisa terjadi akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tetapi disamping itu, inflasi tidak serta merta memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, itu dikarenakan apabila tingkat inflasi di suatu negara tergolong ringan atau dibawah 10 persen maka dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Itu bisa terjadi dikarenakan tingkat kenaikan harga secara umum memotivasi para pengusaha untuk meningkatkan produksinya (Simanungkalit, 2020).

Dari segi kebijakan moneter, inflasi memiliki pengaruh kuat terhadap pola konsumsi masyarakat dan investasi pemerintah dalam pembentukan modal bruto berkaitan dengan harga barang atau jasa. Inflasi ini merupakan suatu fenomena moneter yang meresahkan bagi negara dikarenakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dapat menjadi *boomerang* dan akan menjadi masalah yang serius terhadap perekonomian negara khususnya pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Perwira, 2019). Hal tersebut mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang menyimpulkan jika terjadinya inflasi dapat memberikan pengaruh positif seperti yang dikatakan oleh Ningsih & Andiny (2018) dan Sumaryani (2019) ataupun negatif seperti yang dikatakan oleh Ardani et al., (2010), Habib Saragih (2018), dan juga Ardiansyah (2017) tergantung

dari nilai tingkat inflasinya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H₂: Tingkat Inflasi Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

METODE PENELITIAN

Variabel dependen

Variabel dependen didefinisikan sebagai suatu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Secara umum, Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara yang terus meningkat karena adanya produksi barang dan jasa. Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menggunakan Gross Domestic Product (GDP) sebagai alat pengukurannya.

Variabel independen

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab adanya variabel dependen dan dapat memberikan pengaruh negatif maupun positif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak didefinisikan sebagai pemasukan negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat Penerimaan pajak didefinisikan sebagai pemasukan negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Suhorno, 2012). Adanya penerimaan pajak yang terus meningkat akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan di Indonesia karena dengan penerimaan pajak tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan rakyat Indonesia. rumus yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat penerimaan pajak berdasarkan Sihaloho, (2020) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Total penerimaan pajak tahun ke-n}}{\text{PDB tahun ke-n}} \times 100\%$$

2. Tingkat Inflasi

Secara umum, inflasi merupakan suatu situasi dan kondisi dimana terjadi peningkatan harga-harga produk dan jasa secara berkelanjutan. Tingkat inflasi apabila nilainya cukup tinggi yaitu berada diatas 10% maka dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi. Menghitung tingkat inflasi berdasarkan Ningsih & Andiny, (2018) dapat menggunakan rumus berikut :

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1})}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perekonomian di Indonesia pada tahun 1991 sampai dengan 2020. Populasi tersebut merupakan data perekonomian di Indonesia yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan juga Bank Indonesia (BI). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *judgement sampling* karena sampel yang akan digunakan peneliti mempertimbangkan adanya kelengkapan data yang tersedia yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian. Sehingga, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak, rasio pajak, tingkat inflasi, dan juga PDB dari tahun 1991 sampai 2020 karena sudah tersedianya kelengkapan data tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan juga Bank Indonesia (BI). Sampel yang ada berjumlah 30 dengan total data penelitian tersebut berjumlah 90 data yang berasal dari 30 tahun penelitian dikalikan dengan 3

data perekonomian diantaranya data rasio penerimaan pajak, tingkat inflasi dan juga PDB.

Teknik pengumpulan dan analisis data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diambil merupakan data yang diterbitkan atau diperoleh dari beberapa sumber dan jurnal terdahulu seperti Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), laman-laman berita yang informasinya juga berasal dari sumber penyedia data yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga jurnal-jurnal terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dimana data yang dikumpulkan berdasarkan informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian melalui tinjauan pustaka seperti buku, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian.

Pada penelitian ini dalam melakukan teknik analisis data adalah menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan memakai sebuah aplikasi program komputer yaitu SPSS dengan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini yaitu penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi yang sudah disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga Bank Indonesia (BI) dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Karakteristik Data Penelitian

Kriteria	Tahun Observasi
Penerimaan pajak dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2020	30
Tingkat inflasi dari tahun 1991 sampai dengan 2020	30
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1991 sampai dengan 2020	30
Jumlah Variabel	3
Jumlah Tahun Penelitian	30 tahun
Jumlah Data Penelitian	90

Sumber: Data yang telah diolah (2020).

Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Uji normalitas digunakan agar mengetahui jika dalam sebuah variabel baik dependen ataupun independen terdistribusi normal atau tidak normal. Pengujian ini dilakukan dengan asumsi antara lain $H_0 =$ jika nilai signifikan $>5\%$ memiliki arti bahwa data sudah terdistribusi normal; dan jika $H_1 =$ jika nilai signifikansi $<5\%$ memiliki arti jika data tidak terdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas diukur dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* Test.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	2,58338028
Test Statistic	Absolute	0,191
	Positive	0,073
	Negative	-0,191
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,191
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		.007 ^c
99% Confidence Interval	Lower Bound	.205 ^d
		0,195
	Upper Bound	0,216

Sumber: Hasil output SPSS v. 25 dan data diolah (2021).

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* Test dapat dilihat jika nilai Sig dari *Monte Carlo* adalah sebesar 0,205 atau sudah diatas 0,05. Artinya setelah diketahui jika nilai signifikansi berdasarkan uji normalitas diatas adalah sebesar 0,205 maka data tersebut sudah terdistribusi normal dikarenakan tingkat signifikansinya sudah diatas 0,05 atau 5%. Peneliti menghindari penghapusan data-data atau memanipulasikan data untuk menjaga agar data yang digunakan dapat memberikan gambaran atau informasi yang sesungguhnya dari data yang sudah dikumpulkan.

Uji multikolinieritas

Dalam menentukan apakah suatu penelitian terdapat model yang memiliki masalah multikolinieritas dapat menggunakan dua uji yaitu uji VIF dan uji korelasi. Pertama saya akan melakukan uji VIF terlebih dahulu dilanjutkan dengan uji korelasi sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,936		2,341	0,027		
	Penerimaan Pajak (X1)	0,096	0,058	0,434	0,668	0,871	1,148
	Inflasi (X2)	-0,222	-0,743	-5,599	0,000	0,871	1,148

Sumber: Hasil output SPSS v. 25 dan data diolah (2021).

Berdasarkan hasil uji tabel diatas bahwa nilai dari variabel-variabel tersebut lebih kecil dari 10 atau tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah pada regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain maka perlu dilakukan uji heteroskedastisitas. Untuk menentukan data memiliki masalah heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikan dari t statistik setiap variabel berada dibawah atau tidak melebihi nilai tingkat alpha yaitu sebesar 5% atau 0,05. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang tersedia pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1 (Constant)	4,363	1,719		2,538	0,017	
Penerimaan Pajak (X1)	-0,235	0,150	-0,309	-1,565	0,129	0,871 1,148
Inflasi (X2)	-0,010	0,027	-0,076	-0,385	0,703	0,871 1,148

Sumber: Hasil output SPSS v. 25 dan data diolah (2021).

Berdasarkan hasil *output* pada tabel diatas dapat diketahui jika nilai signifikan pada variabel penerimaan pajak adalah sebesar 0,129 sedangkan untuk nilai signifikan pada variabel inflasi adalah sebesar 0,703. Maka dari itu dapat disimpulkan jika kedua nilai variabel penerimaan pajak (X1) dan juga variabel tingkat inflasi (X2) sudah berada diatas 0,05 atau 5% yang sekaligus menandakan bahwa data atau variabel yang digunakan sudah tidak terkena masalah heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi

Uji ini dilakukan dengan maksud untuk memeriksa hubungan antara *error* residual antar periode waktu observasi, alat uji yang digunakan menggunakan uji *Durbin Watson* sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Autokorelasi

PENENTUAN NILAI	
DURBIN WATSON	1,831
N	30
K	2
NILAI DL	1,2837
NILAI DU	1,5666
NILAI 4-DL	2,7163
NILAI4-DU	2,4334

Sumber: : Data diolah (2021).

Untuk menentukan apakah ada masalah autokorelasi atau tidak dengan cara apabila nilai dari *Durbin Watson* berada diantara DU sampai dengan 4- DU, maka tidak ada permasalahan autokorelasi. Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai dari *Durbin Watson* adalah sebesar 1,831. Maka dari itu dapat disimpulkan jika nilai hasil uji autokorelasi sebesar 1,831 berada diantara nilai DU (1,5666) dan juga nilai 4-DU(2,4334) maka bisa dikatakan data tersebut terhindar dari

masalah autokorelasi.

Uji hipotesis

Uji koefisien determinasi (r^2)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh dari nilai variasi variabel independent secara bersama-sama untuk menjelaskan nilai variasi dari variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 6. Uji R Square

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.766 ^a	0,586	0,555	2,67735	

a. Predictors: (Constant), Inflasi (X2), Penerimaan Pajak (X1)

Sumber: : Hasil output SPSS v. 25 dan data diolah (2021).

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square adalah sebesar 0,586 atau sebesar 58,6%. Hal ini memiliki arti jika variabel penerimaan pajak (X1), dan juga variabel tingkat inflasi (X2) mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Y) sebesar 58,6%, sedangkan untuk sisanya sebesar 41,4% (pengurangan 100%-58,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang peneliti gunakan.

Uji regresi parsial (uji t)

Uji ini dapat diperuntukan untuk mencari tahu pengaruh dari setiap variabel-variabel indenpenden terhadap variabel dependen, yang dimana pada penelitian ini variabel independent yang diujikan adalah penerimaan pajak (X1) dan tingkat inflasi (X2) dan sementara untuk variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut merupakan hasil dari uji regresi secara parsial:

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,936	2,535		2,341	0,027
	Penerimaan Pajak (X1)	0,096	0,221	0,058	0,434	0,668
	Inflasi (X2)	-0,222	0,040	-0,743	-5,599	0,000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: : hasil output SPSS v. 25 dan data diolah (2021).

Berdasarkan hasil pada tabel 7 diatas dapat diketehau jika nilai signifikansi variabel penerimaan pajak (X1) adalah sebesar 0,668 yang nilainya melebihi dari 0,05 atau 5%. Artinya variabel penerimaan pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau bisa dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu tingkat inflasi (X2) yang nilai signifikansinya adalah 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 atau 5%. Artinya variabel tingkat inflasi secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau bisa dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Model Regresi

Data digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder ini merupakan jenis data yang diperoleh dari pihak lain dan jurnal terdahulu atau pengumpulan datanya tidak langsung dari penulis atau peneliti. Pada penelitian ini menggunakan data runtutan waktu (*time series*) dimana rentang waktunya adalah sebanyak 30 tahun dari tahun 1991-2020.

Tabel 8. Hasil Persamaan Regresi

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	5,936	2,535
Penerimaan Pajak (X1)	0,096	0,221
Inflasi (X2)	-0,222	0,040

Sumber: : Hasil output SPSS v. 25 dan data diolah (2021).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 8, dapat diketahui persamaan analisis regresi linear berganda penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,936 + 0,096 X1 - 0,222 X2 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
 X1 = Realisasi Penerimaan Pajak
 X2 = Tingkat Inflasi
 ϵ = Error

Pembahasan

Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menguji apakah beberapa variabel independent seperti penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data penelitian yang digunakan sebanyak total 90 data yang terdiri atas 30 tahun periode atas 3 variabel penerimaan pajak, tingkat inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1991-2020.

Penerimaan pajak

Dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, penerimaan pajak memberikan pengaruh positif (+) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan jika penerimaan pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan terpengaruh positif atau akan mengalami peningkatan juga. Berdasarkan hasil pada uji model regresi apabila terdapat kenaikan penerimaan pajak sebanyak 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan meningkat sebesar 0,096 persen. Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya, hasil dari nilai signifikansi variabel penerimaan pajak (X1) adalah sebesar 0,668 yang nilainya melebihi dari 0,05 atau 5%. Artinya variabel penerimaan pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau bisa dikatakan H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Ardani et al., (2010) yang juga menyatakan jika penerimaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil dari uji parsial tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiningtyas, (2011) yang mengatakan jika pendapatan dan juga belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan apabila kita berkaca pada data

pertumbuhan ekonomi selama periode dari tahun 2011 hingga tahun 2020 atau 10 tahun terakhir, angka persentase pertumbuhan ekonomi cenderung semakin menurun dan bahkan untuk tahun 2020 sendiri angka pertumbuhan ekonomi menyentuh angka -2,07%. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiningtyas, (2011) dimana dikatakan dalam jurnalnya, untuk pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 hingga 2008 juga mengalami penurunan yang juga membuktikan bahkan sebelum tahun 2011 pun pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan sekaligus membuktikan jika penerimaan pajak dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak cenderung mengalami fluktuasi nilai pada setiap tahunnya, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi nilainya cenderung mengalami penurunan yang artinya dimana terdapat tahun bahwa penerimaan pajaknya meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut malah mengalami penurunan nilai sehingga dapat disimpulkan jika penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fluktuatifnya nilai penerimaan pajak ini berhubungan dengan teori keagenan dimana adanya konflik kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah atau DJP dimana masih banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak sedangkan pemerintah ataupun Direktorat Jendral Pajak sangat ingin mengoptimalkan penerimaan pajak negara seperti yang dikemukakan oleh Habib Saragih (2018).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga harus memiliki peran atau andil besar yang ditujukan agar bisa menggali serta meraih potensi-potensi pajak yang ada khususnya pada sektor usaha dikarenakan masih banyak pengusaha atau pelaku bisnis yang belum menjadi wajib pajak, oleh karena itu diperlukan usaha lebih dari pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia serta lebih tegas lagi dalam menerapkan atau memberikan sanksi maupun denda kepada wajib pajak yang malas membayarkan kewajibannya agar tujuan meningkatkan penerimaan pajak nasional dapat tercapai (Sumaryani, 2019).

Inflasi

Dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, tingkat inflasi memberikan pengaruh negatif (-) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa apabila nilai dari tingkat inflasi mengalami peningkatan maka nilai dari pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh negatif (-) atau bisa dikatakan akan menyebabkan turunnya nilai pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji pada model regresi apabila terdapat kenaikan tingkat inflasi sebesar 1 persen maka nilai pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mengalami penurunan nilai pertumbuhan sebesar 0,222 persen. Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya, hasil dari nilai signifikansi variabel tingkat inflasi (X2) adalah sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 atau 5%. Artinya variabel tingkat inflasi secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan juga oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh Ardani et al., (2010) dan juga Perwira, (2019) yang juga menyatakan jika variabel tingkat inflasi memberikan pengaruh negatif (-) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan. Dari hasil yang sudah didapatkan tersebut dapat disimpulkan apabila jika tingkat inflasi mengalami kenaikan atau pertumbuhan nilai maka dapat menggerus pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu akan menyebabkan dampak negatif yang diantaranya harga-harga barang produksi atau jasa akan semakin melambung tinggi, dan apabila dilihat dari sisi makro ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi pada suatu negara dapat menyebabkan daya saing negara tersebut terhadap negara lain akan berkurang karena lemahnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Menurut Ericsson dalam jurnal Sumaryani, (2019) dikatakan jika berdasarkan statistik yang terjadi negara berkembang seperti negara-negara di benua Amerika Latin ataupun Afrika jika pertumbuhan ekonomi memberikan dampak negatif terhadap tingkat inflasi. Dalam jurnal yang sama juga dikatakan apabila nilai tingkat inflasi tidak melebihi dari 9% dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, hal tersebut

dikarenakan tingkat inflasi yang masih tergolong ringan membuat banyak pengusaha akan terpacu untuk memproduksi barangnya lebih banyak lagi agar mendapatkan keuntungan yang lebih lagi atau bahkan berlipat ganda. Lalu khusus untuk tahun 2020 dimana Indonesia mencatatkan nilai tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah yaitu hanya sebesar 1,68% yang diakibatkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan membuat harga barang yang ditawarkan sulit mengalami kenaikan harga. Meskipun nilai inflasi tersebut tergolong sangat rendah bukan berarti pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun tersebut juga semakin membaik, hal itu dikarenakan pemerintah mengambil kebijakan anggaran defisit fiskal untuk mensiasati pertumbuhan ekonomi yang justru akan menyebabkan hutang negara akan semakin membengkak dan resiko terburuknya menyebabkan inflasi yang tinggi pada masa yang akan datang. Hal tersebut berkaitan dengan teori kuantitas dimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut dapat menyebabkan tumbuhnya utang kepada pihak ketiga yang membuat Bank Indonesia harus mencetak uang lebih banyak lagi untuk mengganti utang tersebut sehingga akan meningkatkan volume uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan tersebut diambil akibat dampak yang disebabkan oleh terjadinya penyebaran virus Corona yang memberikan tekanan terhadap setiap sektor usaha dan membuat buruknya penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak didalamnya.

SIMPULAN

Kesimpulan

Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui hasil pengujian analisis linear berganda mengenai apakah variabel-variabel independent seperti penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil dari hipotesis penelitian ini adalah variabel penerimaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan untuk variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif (-) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil uji parsial atau uji t dikatakan jika variabel penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lalu untuk variabel tingkat inflasi berdasarkan hasil uji t membuktikan jika tingkat inflasi merupakan variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti hanya menguji 2 variabel independent yaitu variabel penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan terbatasnya akses data sehingga hanya menggunakan 2 variabel tersebut. Penelitian ini juga hanya terbatas pada total penerimaan pajak secara umum, bukan penerimaan pajak berdasarkan regional sehingga tidak memperhatikan total besaran penerimaan pajak berdasarkan provinsi atau daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan terkait topik ini yaitu dapat menggunakan variabel-variabel lain diluar variabel pada penelitian ini yang juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak regional atau per provinsi bahkan daerah agar sampel yang digunakan dapat lebih bervariasi dan data yang diperoleh pun semakin jelas darimana asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, R. P., Setiawan, J., & Sari, R. P. (2010). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. *Mabasiswa Universitas Pembangunan Nasional“ VETERAN”Surabaya*, 1–22.
- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3), 1–5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v5n3.p%25p>
- Daniel, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1), 131.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.37>
- Imas M, F., & Munawar. (2017). *Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Inflasi, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga di Indonesia*.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53–61.
- Ofoegbu, G. N., Akwu, D. O., & O, O. (2016). Empirical Analysis of Effect of Tax Revenue on Economic Development of Nigeria. *International Journal of Asian Social Science*, 6(10), 604–613.
<https://doi.org/10.18488/journal.1/2016.6.10/1.10.604.613>
- Perwira, A. R. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak dalam Negeri , Pembentukan Modal Bruto , dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(2), 104–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i2.2711>
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 17–27.
<https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Sihaloho, E. D. (2020a). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209.
- Sihaloho, E. D. (2020b). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2011a). Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia Menuju Good Governance 2011*, 1–21.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2011b). Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia Menuju Good Governance 2011*, 1–21.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Management*, 13(3), 327–340.

Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 16–27.